IDN/ANTARA

RENCANA PEMBERLAKUAN BRAGA BEBAS KENDARAAN

Pengendara melintas di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jabar, Kamis (25/4). Pemkot Bandung mencanangkan penerapan program Braga Free Vehicle atau Braga tanpa kendaraan setiap Sabtu dan Minggu yang akan disosialisasikan dan uji coba pada Mei 2024 untuk mengatasi kemacetan dan memperindah kawasan wisata Braga.

Pemkab Serang Ingin Pemprov Banten Tinjau Ulang Izin Tambang Pasir Laut

Harus ada pembahasan ulang yang melibatkan semua unsur pemerintah Kabupaten Serang dan masyarakat yang terdampak akibat adanya proses penambangan pasir laut.

SERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menginginkan agar keberadaan tambang pasir laut di kabupaten serang dapat ditinjau ulang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Usulan tersebut muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang dalam rapat paripurna penyampaian Keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Serang atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Serang Akhir Tahun Anggaran 2023.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, munculnya rekomendasi untuk meninjau ulang keberadaan perusahaan tambang pasir laut yang beroperasi di Kabupaten Serang tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Serang.

"Pasir laut ini sebenarnya dapat mendongkrak pendapatan sangat berdampak dari pajaknya, tetapi ada aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD yang menyuarakan pada saat rapat finalisasi Pansus kemarin apakah kemudian PAD yang diterima oleh Kabupaten Serang ini dampaknya lebih baik dibanding dengan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pasca pengerukan pasir laut," katanya saat ditemui usai rapat Paripurna, Kamis (25/4).

Namun demikian, pihaknya terkendala lantaran perizinannya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah pusat. Pihaknya pun meminta agar Pemkab Serang menyampaikan ke Pemprov Banten untuk di tinjau ulang.

"Cuma kan posisinya, penambangan pasir laut ini bukan di kita, perizinan ada di tingkat provinsi walaupun lokusnya ada di wilayah Kabupaten Serang. Maka pansus kemarin merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk menyampaikan pemprov untuk meninjau ulang," tegasnya.

Menurutnya, harus ada pembahasan ulang yang melibatkan serta unsur pemerintah Kabupaten Serang dan masyarakat yang terdampak akibat adanya proses penambangan pasir laut.

"Apapun keputusannya kami serahkan, kita hanya meneruskan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD. Kewenangan di provinsi karena perizinannya di sana. Kita perlu mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan yang terjadi apakah lebih besar dampak negatifnya maka itu yang harus dikaji ulang," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku dirinya sama sekali tidak diberitahu oleh pihak Provinsi Banten mengenai adanya operasional kembalinya perusahaan-perusahaan yang menambang pasir laut di Kabupaten Serang.

"Karena kemarin ini sampai Pemda tidak tahu bahwa di sekitar pulau tunda itu mulai diambil lagi pasirnya, rasanya salah ya. Harusnya sebelum turun provinsi sudah berkomunikasi dengan Pemda, bahwa ini ada penambangan lagi, jumlahnya segini sehingga kita ikut menghitung kan, karena ketika ditanya BPK uang segini apa dasarnya, kita bingung nantinya," tegasnya.

Tatu mengatakan, perizinan untuk tambang pasir laut ini memang berada di Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten. Namun demikian, seharusnya ada unsur dari pemerintah daerah sehingga tidak terjadi mis komunikasi.

"Ini kan perizinannya masih di provinsi, kalau perizinannya masih diperpanjang, Pemda ya minta kejelasan, semuanya transparan, karena agar masalahnya tidak di kita, dan merugikan juga kan, harusnya pemerintah daerah PAD dapat uang berapa dan untuk masyarakat, ini tidak sesuai," tegasnya.

Untuk itu, Tatu mengaku sepakat dilakukannya pembahasan ulang yang melibatkan Pemkab Serang, sehingga nantinya apapun keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Jadi duduk bareng, yang mau diambilnya berapa, terus jadwal pengambilannya kapan, berapa tiap mengambil, nah itu kan harus jelas, jangan kaya kemarin ngambil dulu, itu salah itu. Nanti semuanya salah," pungkasnya. ● **pra**

Pemkab Bogor Raih Penghargaan Terbaik SPM Awards Tahun 2024 Tingkat Nasional

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih juara pertama pada penganugerahaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2024 Kategori Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/4).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo. Pada ajang SPM Awards 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai berkinerja terbaik dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun anggaran 2023.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, penghargaan ini menjadi semangat, pemicu dan pemacu bagi aparat yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan.

Hal ini adalah bagian dari upaya dan ikhtiar bersama. Tentunya capaian peringkat pertama SPM Awards tahun 2024 ini akan semakin meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor," ungkap Asmawa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 130 ayat 1 mengamatkan bahwa Dana Alokasi Umum Atau DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.

"Selanjutnya pada pasal 141 ayat 1 dan pasal 144 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah dan belanja daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM," jelas John Wempi.

Ia menambahkan, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui SPM diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Saya menyampaikan selamat kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang menerima penghargaan SPM Awards hari ini. Semoga ini menjadi spirit, dorongan, dan motivasi mewujudkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya saya minta terus tingkatkan strategi dan inovasi dalam pencapaian SPM," kata Wamendagri John Wempi Wetipo.

Pj. Bupati Bogor, Aswama Tosepu hadir menerima penghargaan didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. ● **gio**

IST

Pemkab Bogor mendapat penghargaan terbaik pertama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2024 Tingkat Nasional.

PT. RABANA INVESTINDO
Gedung Rabana Lt. 6, Jl. Tomang Raya No. 48 A, JAKARTA, 11430
Telepon: (021) 5669808-10 Faksimili: (021) 5671646

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tanggal dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		**LIABILITAS DAN EKUITAS**	
		LIABILITAS	
Kas dan Setara Kas	54.824.734.554	Pendapatan Diterima Dimuka	1.374.293.456
Piutang Pembiayaan Investasi - Bersih	2.494.035.973	Utang Pajak	1.065.952.922
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Bersih	63.627.319.859	Liabilitas yang Diestimasi	2.049.165.566
Piutang Pembiayaan Multiguna - Bersih	12.167.592.256	Liabilitas Lancar Lainnya	76.062.670
Aset Tetap - Bersih	18.548.112.032	**JUMLAH LIABILITAS**	4.565.474.614
Aset Pajak Tangguhan	545.573.469		
Aset Lain-lain	32.105.512.416		
		EKUITAS	
		Modal Saham	100.000.000.000
		Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	1.304.017.342
		Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap	22.907.698
		Laba Bersih Tahun Berjalan	8.045.824.993
		Tambahan Modal Disetor	12.260.606.004
		Saldo Laba	58.114.049.908
		JUMLAH EKUITAS	179.747.405.945
JUMLAH ASET	184.312.880.559	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	184.312.880.559

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan Pembiayaan Investasi	244.237.185
Pendapatan Pembiayaan Modal Kerja	6.066.326.133
Pendapatan Pembiayaan Multiguna	1.132.511.169
Pendapatan Sewa dan Lainnya	2.346.946.031
Jumlah Pendapatan Usaha	9.790.020.518
BEBAN USAHA	
Beban Umum dan Administrasi	(5.014.092.279)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain	4.524.963.374
LABA SEBELUM PAJAK	9.300.891.613
PAJAK PENGHASILAN	(1.122.777.473)
Manfaat Pajak Tangguhan	(132.289.147)
LABA BERSIH	8.045.824.993
Pendapatan Komprehensif Lain	95.765.684
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	8.141.590.677

Catatan: Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo & Rekan

Jakarta, 25 April 2024
S.E.& O

Direksi

Warga Keluhkan Air Got Rembes Hingga ke Jalan Protokol Cilegon

CILEGON (IM)- Air got merembes ke Jalan Protokol Kota Cilegon. Kondisi tersebut pun dikeluhkan warga lantaran menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan karena bau dan kotor. Pantauan di lokasi, sepanjang Jalan Protokol Kota Cilegon dari arah Cilegon menuju Merak terdapat sedikitnya lima genangan air dari rembesan got yang tidak berfungsi di Jalan Protokol tersebut.

Salah seorang warga Rosikin mengaku, adanya air got yang keluar hingga ke jalan itu membuat dirinya kurang nyaman saat melintasi rembesan air got di jalan tersebut. "Setiap hari saya liat air got ini, kebetulan ini posisinya deket tempat kerja saya," katanya saat ditemui di lokasi terdapat genangan air got di Jalan SA Tirtayasa Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kamis (25/4).

Selain kotor dan bau, menurutnya adanya genangan air got tersebut membuat pemandangan kurang enak dilihat. "Ini sudah lama, air got rembes ini, apa lagi hujan turun airnya semua naik ke jalan," katanya. Seraya berharap semoga masalah got tersebut segera diperbaiki oleh instansi terkait.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, Tb Dendi Rudiatna saat dikonfirmasi RADARBANTEN.CO.ID dirinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena got tersebut berada kewenangan Pemerintah Pusat. "Karena di Jalan Protokol ya, kami akan koordinasi ke Kemenpupr," katanya. ● **pra**

Federasi SP BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi di Tangerang

TANGERANG (IM)- Federasi serikat pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan menggelar aksi sosial dan diskusi publik sebagai rangkaian memperingati Hari Buruh Tahun 2024.

Dalam kesiapannya sebanyak 17 anggota afiliasi serikat pekerja dari total 22 serikat pekerja perusahaan BUMN sepakat untuk tidak akan ikut aksi turun ke jalan atau demonstrasi.

Namun, pihaknya akan memperingati Hari Buruh pada 1 Mei mendatang dengan kegiatan positif seperti aksi sosial hingga diskusi. "Pentingnya perayaan Hari Buruh yang kondusif, konstruktif, dan positif, serta menggarisbawahi komitmen Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN untuk melakukan aksi sosial dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) mengenai hak-hak pekerja, kesejahteraan, dan perjuangan pengurus serikat pekerja," ujar Ketua Umum Federasi SP Sinergi BUMN, Anton Witarman di Tangerang, Kamis (25/4).

Ia mengatakan, tanggung jawab ideologis pengurus serikat pekerja BUMN dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di perusahaan.

Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Karyawan Jasa Marga, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku sebagai fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan perusahaan BUMN yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan pekerja, keluarga, dan perekonomian nasional sebagai tugas ideologis BUMN.

Dalam hal tersebut, serikat pekerja BUMN menggelar Halal bihalal, konsolidasi dan jajak pendapat dengan para anggota sebagai persiapan menghadapi peringatan Hari Buruh. Acara itu, diikuti oleh 17 anggota afiliasi Serikat Pekerja dari total 22 serikat pekerja perusahaan BUMN seperti, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Serikat Pekerja Perum LKBN Antara Perjuangan, Forum Komunikasi Karyawan (FKK) PT. Persero Batam (Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam), Serikat Pekerja PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Serikat Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Serikat Pekerja Garuda Maintanance Facility (GEC), Serikat Pekerja PT. Indonesia Re (Persero).

Dari kegiatan itu, pihaknya menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain seperti merayakan Hari Buruh dengan suasana yang kondusif, konstruktif, dan positif, memberikan penghargaan kepada karyawan BUMN yang tetap melaksanakan tugas pada tanggal 1 Mei 2024, melakukan aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan BUMN, mengadakan FGD yang membahas hak-hak pekerja, kesejahteraan, dan perjuangan pengurus serikat pekerja. ● **pra**

IDN/ ANTARA

SIDAK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING DI BALI

Petugas memberikan penjelasan kepada wisatawan mancanegara mengenai program pungutan wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali di Goa Gajah, Gianyar, Bali, Kamis (25/4). Dinas Pariwisata Prov. Bali melakukan sidak terhadap wisatawan mancanegara yang belum membayar pungutan sebesar Rp150 ribu di sejumlah lokasi pariwisata.

Pemkot Serang Sediakan 200 Kuota ASN untuk Tenaga Honorer Tahun 2024

SERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hanya mengajukan kuota sebanyak 200 orang untuk penempatan di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 ke pemerintah pusat.

Selain PPPK, Pemkot Serang juga telah mengajukan kuota untuk CPNS sebanyak 700 di tahun 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kuota sebanyak 200 PPPK kepada pemerintah pusat. "Kuotanya 200 untuk PPPK. Pengajuannya sudah dikirim ke pemerintah pusat sebelum bulan puasa itu, dan sudah di-acc," ujar Karsono saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/4).

Karsono menjelaskan, kuota PPPK tahun 2024 akan lebih diprioritaskan pada tenaga honorer kategori II. "Kalau kebijakan pusat itu diutamakan oleh kategori II," katanya.

Namun, kata Karsono, pemerintah pusat juga berencana akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer agar terkaver seluruhnya menjadi PPPK. Bagi tenaga honorer yang tidak masuk kuota yang sudah ditentukan, akan dimasukkan ke PPPK paruh waktu. "Kalau tidak masuk di kategori II akan diselesaikan di tahun 2024. Karena ada kebijakan tenaga PPPK paruh waktu dengan gaji setengahnya dari PPPK penuh waktu," tuturnya.

Menurutnya, saat ini Pemkot Serang masih menunggu keputusan pemerintah pusat dari kebijakan tersebut. "Tahun 2024 mungkin sudah selesai, karena ini kebijakan pusat dan kami masih menunggu. Akan diselesaikan, kalau tidak bisa penuh nanti yang paruh waktu," katanya. ● **pra**